

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 47/DSN-
MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI
PURWOASRI KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Armei Ekawati

NIM. C92215088



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Armei Ekawati

NIM : C92215088

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Madyosari RT 01 RW 03 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat
Kabupaten Kediri

Nomor HP : 085749711740

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT
Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019
Saya yang Menyatakan,

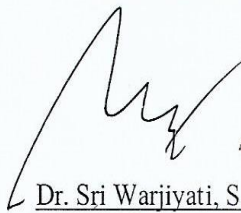


Armei Ekawati
NIM. C92215088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Armei Ekawati NIM. C92215088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019
Dosen Pembimbing,



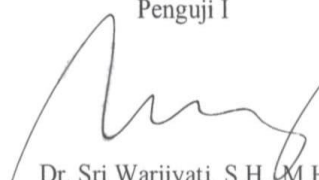
Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Armei Ekawati NIM. C92215088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H
NIP.196808262005012001

Penguji II


Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Penguji III


Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn
NIP.197903312007102002

Penguji IV


Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP.199007122015032008

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Armei Ekawati
NIM : C92215088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Armeiekawati12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian

Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2019

Penulis

(Armei Ekawati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri” adalah hasil penelitian lapangan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri; dan 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KSPPS yaitu manager, karyawan dan anggota koperasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menganalisis iktikad anggota. Jika ternyata tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya, maka akan diberikan SP serta diwajibkan menyelesaikan pembiayaannya dan ketika tidak menyelesaikan pembiayaannya maka pihak KSPPS akan melakukan penghapusan data pembiayaan (pemutihan) sebagai langkah terakhir penyelesaian. Dalam tinjauan Hukum Islam penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut *sād al-dhārī'ah* karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian pembiayaannya juga masih belum sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 karena tidak melalui tahap penjualan jaminan melainkan langsung dilaksanakan pemutihan atau penghapusan data.

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri harus lebih tegas dalam menganalisis kelayakan anggota yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pembiayaan serta lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang ada dalam realisasi pembiayaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan secara cepat, terhitung sejak pertama kali berdirinya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 hingga sekarang. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai dana atau pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).¹

¹ Darsono, et al., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2012), 3.

Jaminan pada sebuah pembiayaan menjadi salah satu komponen yang sangat penting, dikarenakan adanya jaminan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian jika dikemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam hal pelaksanaan pembayarannya terjadi kemacetan, atau nasabah dalam hal pembayaran angsuran tidak menepati jadwal yang telah di disepakati bersama. Pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah biasanya digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Jika pembiayaan sudah memasuki kategori macet biasanya nasabah sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, baik itu karena faktor sudah bangkrut atau memang mempunyai itikad tidak baik. Pada tahap ini ketika nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka pihak lembaga keuangan atau dalam hal ini KSPPS harus melakukan penyelesaian pembiayaan baik itu dengan melakukan sita jaminan/ agunan atau penyelesaian yang lainnya. Adapun pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang tidak baik, hal ini dikarenakan pada saat melakukan akad pembiayaan *murābahah* pihak KSPPS BMT Sumber Barokkah Mandiri tidak meminta jaminan tambahan/ agunan sehingga hal ini menjadi peluang bagi anggota untuk ingkar terhadap pembiayaan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada subyek penelitian yaitu Pembiayaan Macet. Perbedaan penulisan terletak pada pisau analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

- ⁷ M. Irham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subyek penelitian yakni pembiayaan macet atau kredit macet dan menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005, sedangkan perbedaanya terletak pada pisau analisis dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan Fatwa DSN MUI pada penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan pisau analisis Fatwa DSN MUI melainkan juga menggunakan pisau analisis Hukum Islam yaitu *Sād al-dhārī'ah*.

[illegible]

3. Skripsi saudara Kholiqul Azis tentang “*Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Muṛabahah Yang Macet Di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar*”.

Skripsi ini membahas tentang produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar. Pada praktiknya pembiayaan tersebut mengalami pembiayaan tidak lancar atau disebut sebagai kredit macet dimana nasabah tidak dapat membayar tagihan yang telah disepakati oleh pihak KSPPS dengan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah langkah-langkah penanganan pembiayaan macet yang dilakukan KSPPS Bina Insan dianggap sudah memenuhi prosedur dengan baik dengan melakukan upaya pencegahan, dan penyelesaian, seperti *revitalisasi*, *collection agent*, dan penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi.⁹

Persamaan dari penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada subyek pembahasan yakni berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan macet dan juga pisau analisis yang sama-sama menggunakan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan pisau analisis dimana peneliti terdahulu hanya menggunakan Fatwa DSN MUI dan pada penelitian ini penulis akan menggunakan pisau analisis Fatwa DSN MUI dan Hukum Islam yaitu *Sād al-dhārī'ah*.

⁹ Kholiqlul Azis, Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Yang Macet Di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2018).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subyek penelitian yaitu *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota sehingga terjadi pembiayaan macet, sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis dimana penelitian sebelumnya menggunakan *murābahah*, Fatwa Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sedangkan pada penelitian ini penulis hanya

[illegible]

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data baik dari buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan.²¹ Metode dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan *murābahah* dan penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, meliputi kontrak perjanjian pembiayaan *murābahah*, Peraturan khusus KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan macet.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan maupun pustaka kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang telah diperoleh dari proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang

²¹ Soerdjono Soekamto, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri atas sub bab, dimana antara satu dengan yang lain berkaitan dan menjadi pembahasan yang utuh.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang *murābahah* yang memuat tentang pengertian pembiayaan *murābahah*, landasan hukum, rukun dan syarat *murābahah*, kemudian konsep umum hukum Islam tentang *Saad adh-dhāri'ah*,

[illegible]

karakteristik pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya, serta Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Bab ketiga, Penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet yang memuat tentang gambaran umum KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri, Prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah*, latar belakang munculnya pembiayaan macet, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, dan upaya penyelesaian pembiayaan macet tersebut.

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam dan fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Peneliti akan membicarakan tentang penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Pada bab ini merupakan kerangka jawaban atas pokok-pokok masalah yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang dianggap perlu.

menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵

Kesimpulannya pembiayaan *murābahah* adalah penyediaan barang oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan menggunakan akad jual beli dengan ditegaskan margin atau keuntungan, artinya pihak lembaga keuangan akan memberitahukan berapa harga awal barang tersebut dibeli dan akan memberitahukan berapa keuntungan yang dia ambil tersebut kepada calon pembeli atau bisa disebut pembeli kedua. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Murābahah merupakan salah satu akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Berikut adalah dalil tentang diperbolehkannya *Murābahah* yaitu sebagai berikut:

a. Firman Allah pada QS. An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.⁶

⁵ Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Jalal, 2010), 83.

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqrādah* (*muḍārah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)”.⁷

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Rukun *murābahah* menurut jumhur ulama adalah sama dengan dengan rukun yang terdapat dalam jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *ṣighah* (*ijab* dan *qabul*). Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *ṣighah*, artinya *ṣighah* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi dan

objek yang di transaksikan.⁸ Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *murābahah* yaitu:⁹

a. Penjual (*bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjual belikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*mushtari*)

Pembeli adalah seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*mabi'*)

Objek jual beli atau Objek akad merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

d. Ijab kabul

Para ulama fikih menyatakan, bahwa unsur utama adanya jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksinya bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 93.

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, 39.

- d. Jual beli *murābahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

Dalam akad *murābahah* objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang di inginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan akan tetapi merupakan bagian dari riba.

- e. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Jika transaksi pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual secara *murābahah*.

5. Implementasi Pembiayaan *Murābahah*

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *murābahah* di terapkan pada pembiayaan *murābahah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok di tambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank.¹² Adanya akad *murābahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.¹³

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, 88.

¹³ Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016). 84.

1. Pengertian

[illegible]

التَّوَّصَّلُ بِمَا هُوَ مُضِلٌّ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sād al-dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sedangkan ‘Abdul-Karim Zaidan menjelaskan pengertian *sād al-dharī'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹⁷

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia, 2005), 172.

¹⁵ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 222.

¹⁶ Rachmat Syaife'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 132.

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, 172.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 161.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orangtua orang lain seolah-olah melaknat orangtua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sād al-dhārī'ah*.²³

Sād al-dhari'ah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam Islam, namun tidak semua ulama sepakat dengan *sād al-dhari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum pandangan ulama dapat diklasifikasikan kedalam

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 240.

- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan ini difokuskan pada segi *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunah). Sebaliknya jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

4. Macam-Macam *Sād al-dhari‘ah*

Para ulama membagi *sād al-dhari'ah* berdasarkan dua segi yaitu segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

a. Segi kualitas kemafsadatan

Menurut imam Ash-Shatibi, *sād al-dhari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan terbagi menjadi empat macam yaitu:²⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti (*qat'ī*). Misalnya seseorang menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur sebab tidak mengetahuinya. Bentuk dari kemafsadatan ini dapat dipastikan yaitu terjatuhnya pemilik rumah kedalam sumur tersebut.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 133.

Menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

[illegible]

- 1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahli*).

Kedua macam *sād al-dhārī'ah* ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibagi lagi kedalam:²⁹

- 1) Yang kemaslahatan pekeraan itu lebih kuat dari kemafsadatannya
- 2) Yang kemafsadatannya lebih besaar dari kemaslahatannya.

Kedua bentuk *dhari'ah* ini, menurutnya terbagi lagi kedalam empat bentuk yaitu:

- 1) Yang secara sengaja ditunjukan untuk suatu kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras.
- 2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditunjukkan untuk melakukan suatu kemafsadatan.
- 3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. Seperti mencaci maki sesembahan orang musrik

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul...*, 166.

Dalam hal menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada pembiayaan *murābahah* dapat dilihat dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah yang dapat digolongkan kepada:³²

Pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

³² Ibid., 250.

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
- 2) Menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai;
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru;
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis;
- 6) Meninggalnya nasabah;
- 7) Terjadi bencana alam;
- 8) Adanya kebijakan pemerintah;³⁴

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memiliki syarat pelunasan.³⁵

³⁵ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah...*, 277.

d. Penyelesaian melalui Badan Peradilan (*Al-Qadha*)

- 1) Gugat perdata melalui pengadilan agama
- 2) Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri
- 3) Permohonan pailit melalui Peradilan Niaga³⁶

D. Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

1. Penerbitan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 adalah fatwa tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Merupakan hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 17 Februari 2005 M/ 08 Muharam 1425 H yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Bapak K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional Bapak Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin.³⁷

2. Alasan Diterbitkannya Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tersebut bahwasanya ada kepentingan tentang penyelesaian piutang dalam pembiayaan *murābahah* dimana nasabah sudah tidak mampu menyelesaikan atau membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan. Selain itu Bank merupakan lembaga intermediasi yang berorientasi pada bisnis, maka dari

³⁶ Ibid.

³⁷ Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

melunasi pembiayaanya. Dalam hal penyelesaian tersebut ada beberapa ketentuan yang mengaturnya antara lain:

Pertama, obyek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar yang disepakati, penjualan obyek *murābahah* atau jaminan lainnya menjadi alternatif pertama ketika nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kedua, Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari Hasil penjualan obyek *murābahah* atau jaminan lainnya.

Ketiga, jika penjualan obyek *murābahah* atau jaminan lainnya melebihi sisa hutang nasabah maka pihak LKS harus mengembalikan sisanya kepada nasabah, dengan catatan bahwa segala hutang dan biaya yang di timbulkan sudah dilunasi.

Keempat, jika hasil penjualan obyek *murābahah* lebih kecil daripada hutang atau kewajiban nasabah maka pihak nasabah mempunyai kewajiban untuk tetap membayar dan melunasi sisa hutang yang masih kurang.

Kelima, Nasabah akan dibebaskan dari hutangnya apabila ia sudah tidak mampu membayar dan menyelesaikan sisa hutangnya, sisa hutang nasabah yang tidak mampu membayar tersebut akan di bebaskan atau dianggap lunas oleh pihak LKS

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER
BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI**

1. Sejarah KSPPS Sumber Barokah Mandiri

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebelumnya hanya sebuah kelompok atau perkumpulan yang prihatin dengan kondisi masyarakat yang terjerumus kedalam transaksi riba, dimana sekelompok orang tersebut yang terdiri dari 31 orang kemudian bermusyawarah untuk mendirikan sebuah koperasi syariah. Hal lain yang mendasari berdirinya KSPPS adalah ingin memahami masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat dapat terbantu dengan adanya pendanaan/ pembiayaan yang di tawarkan oleh Koperasi, serta mengamalkan prinsip amar ma'ruf.¹

48

Alamat : Dusun Bangi RT 03 RW 06 Desa Woromarto
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Telp/Fax : 081 231 088 897 – 085 855 431 071⁴

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

Susunan kepengurusan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri periode 2016-2020 dipimpin oleh Bapak H. Agung Wahyudi selaku *manager*, dimana *manager* mempunyai tugas memimpin usaha KSPPS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan; merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga; serta membina hubungan kerjasama baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, Bapak Lutfi Aris P. Dan Bapak Nur Rozak S.kom menjabat sebagai Kasir atau *Teller* yang mempunyai tugas utama yaitu merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai maupun non tunai.

Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri juga terdapat staf *marketing* sekaligus menjadi staf pembiayaan, pada bagian ini dijabat oleh Bapak Ahmad Yudi H. yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab melayani pengajuan pembiayaan; melakukan analisis kelayakan pembiayaan; melakukan sosialisai seluruh produk KSPPS; dan melakukan penagihan terhadap angsuran/pembayaran pembiayaan.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Ahmad Yudi H, *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2019.

- 1) *Character* (karakter anggota) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang dalam kesehariannya.
 - 2) *Capacity* (kemampuan membayar) Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok dan margin pembiayaan.
 - 3) *Capital* (modal) yaitu penilaian terhadap posisi keuangan calon nasabah pembiayaan untuk mengetahui permodalan.
 - 4) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) yaitu penilaian kondisi pasar dalam negeri atau luar negeri, masa lalu atau yang akan datang untuk penentuan dalam hal prospek pemasaran hasil usaha dari calon nasabah pembiayaan.
 - 5) *Collateral* (jaminan) Yaitu penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah untuk mengetahui kecukupan nilai agunan dengan pemberian pembiayaan.
- b. Prosedur

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Dalam pembiayaan ini pihak KSPPS akan memfasilitasi segala keperluan nasabah selama keperluan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. prosedur pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri di secara umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹¹

¹¹ Ahmad Yudi H, *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2019.

- 1) Calon anggota datang ke kantor KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian *teller* akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
- 2) Calon anggota akan diberikan formulir pendaftaran keanggotaan (jika nasabah tersebut belum menjadi anggota koperasi), kemudian nasabah akan diberikan formulir surat permohonan pembiayaan.
- 3) Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan mengisi Surat Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan serta memberitahukan pembiayaan apa yang hendak diajukan. Pada tahap ini anggota juga akan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan serta rekomendasi tempat yang akan digunakan untuk membeli barang tersebut.
- 4) Pihak koperasi melalui staf Bagian Pembiayaan akan mengecek kelengkapan dokumen Permohonan Pembiayaan, melakukan survei, kemudian melakukan analisis atas semua informasi dan fakta yang telah diajukan oleh anggota.
- 5) Setelah dilaksanakan pengecekan pihak koperasi akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembiayaan tersebut diajukan.

“Pembiayaan bermasalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marginn atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 2 (dua) bulan dan belum melampaui 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman (nilai kolektibilitas 2 (dua)).¹⁷

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marjin atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman (nilai kolektibilitas 3 (tiga)).

¹⁷ Merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penamaan lainnya.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marin atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman atau telah melampaui jatuh tempo (nilai kolektibilitas 4 (empat))”.

Pembiayaan macet menurut Bapak Ahmad Yudi H. banyak terjadi pada pembiayaan barang-barang elektronik dan *handphone*, ini terjadi karena pada penyelesaian pembiayaannya anggota tidak mau melunasi pembiayaannya atau ada juga anggota yang sudah tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya.

Dalam kurun bulan Mei 2019 pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah dapat dirincikan sebagai berikut:

3.1 Data Pembiayaan Macet (Bulan Mei 2019)

No.	Nomor Pembiayaan	Objek Pembiayaan	Jumlah Tunggakan
1.	1.01.02.00063	Hanphone Samsung J3	Rp 1.522.000,-
2.	1.01.02.00066	Bahan Bangunan	Rp 1.812.000,-
3.	1.01.02.00072	Sepeda “United”	Rp 282.000,-
4.	1.01.02.00075	Handphone	Rp 931.000,-
5.	1.01.02.00084	Laptop dan Printer	Rp 2.473.000,-
6.	1.01.02.00096	Mesin cuci Motor	Rp 746.000,-
7.	1.01.02.00121	Alat-alat Salon	Rp 1.960.000,-
8.	1.01.02.00128	Hanphone Coolpad Roar Plus	Rp 804.000,-
9.	1.01.02.00213	Handphone Samsung J3	Rp 2.332.000,-
10.	1.01.02.00231	Handphone Asus Zenfone Max	Rp 2.482.000,-

Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan macet banyak terjadi pada objek pembiayaan berupa *handphone* dimana dalam tabel tersebut rata-rata pembiayaannya adalah sebesar Rp 800.000.- hingga Rp 1.000.000.-. selain itu alat-alat elektronik juga menjadi salah satu objek pembiayaan yang cukup banyak mengalami kemacetan dalam pelunasannya.

a. Faktor internal

- Anggota yang menajukan pembiayaan di Koperasi rata-rata adalah masyarakat sekitar koperasi begitupun dengan staf atau karyawannya, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dikarenakan antara anggota dan staf atau karyawan koperasi saling mengenal.

- Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri jumlah karyawan atau staf yang bekerja masih belum banyak, sehingga dalam proses pengawasan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan masih sedikit kesulitan.

- 3) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan dalam proses pembiayaan;

Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan *murābahah* tidak diwajibkan atau dipersyaratkan memberikan jaminan tambahan, sehingga dalam hal pengajuan pembiayaan anggota hanya cukup melengkapi syarat dan mematuhi segala ketentuan yang ada dan pembiayaan tersebut sudah dapat di realisasikan.

Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Heru Prasetyo, beliau menegaskan bahwa pada saat ia mengajukan pembiayaan berupa alat *sound system* dari pihak koperasi tidak meminta adanya jaminan tambahan.¹⁸

- 4) Kurangnya pengawasan yang *monitoring* kepada anggota;

Kurangnya pengawasan dan *monitoring* juga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah, anggota akan dengan mudah melakukan *wanprestasi* karena dari pihak Koperasi masih kurang dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga disebabkan karena minimnya staf atau karyawan yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah.

- 5) Operasional koperasi yang masih tergolong baru;

KSPSS BMT Sumber Barokah Mandiri berdiri sejak tahun 2016, dan ini masih tergolong baru jika dilihat dari operasionalnya. Karena masih baru inilah yang menjadi salah satu fakto pembiayaan bermasalah cukup banyak terjadi.

¹⁸ Heru Prasetyo, *Wawancara*, Kediri, 11 Juni 2019.

b. Faktor eksternal

1) Adanya i'tikad tidak baik dari anggota;

Anggota mempunyai itikad tidak baik dalam hal pelunasan pembiayaan, fakto ini juga menjadi penentu terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah, selain itu karena tidak ada jaminan tambahan yang dipersyaratkan semakin memperkuat anggota untuk melakukan itikad tidak baik.

2) Kondisi perekonomian yang tidak stabil;

Anggota yang mengajukan pembiayaan dalam kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil, yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja, gagal panen dan sebagainya juga menjadi salah satu faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah bahkan hingga pembiayaan macet.

3) Besarnya angsuran yang di ambil oleh anggota;

Angsuran yang diambil oleh anggota terlalu besar atau jumlah pembiayaan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh sehingga ini menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah hingga terjadinya pembiayaan macet.¹⁹

¹⁹ Lufti Aris P., *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2019.

d. Melakukan perpanjangan waktu (*rescheduling*/ penjadwalan ulang)

Dalam hal ini pihak koperasi akan melaksanakan penjadwalan kembali kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya sesuai kesepakatan awal dengan memberikan keringanan dalam jangka waktu pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain perpanjangan waktu.

e. Penghapusan data (pemutihan)

Penghapusan data atau pemutihan ini adalah langkah terakhir yang di tempuh koperasi ketika anggota mengalami kemacetan dalam penyelesaian pembiayaannya dan mempunyai itikad tidak baik dengan tidak membayar kewajibannya. Meskipun data anggota yang melakukan pembiayaan ini sudah di hapus atau anggota di anggap sudah menyelesaikan pembiayaannya.²²

²² Ibid.

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya melingkupi penghimpunan dan penyaluran dana yang berdasarkan prinsip syariah. Bentuk dari penghimpunan dana berupa adanya simpan pinjam dan bentuk dari penyaluran dana adalah pembiayaan. Banyak akad yang digunakan dalam hal pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.

Sebagai pembiayaan yang banyak digemari oleh anggota menjadikan pembiayaan *murābahah* tidak terlepas dari adanya sebuah resiko pembiayaan bermasalah, baik itu resiko pembiayaan diragukan ataupun pembiayaan macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah adalah ketika nasabah tidak mampu

menyelesaikan pembiayaan yang ia ajukan, sehingga mengakibatkan pembiayaan tersebut tidak terbayarkan.

Hal serupa juga dialami oleh KSPPS BMT Sumber Barokah, sebab dalam proses penyaluran pembiayaan seringkali terjadi pembiayaan bermasalah dan mengakibatkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika sudah terjadi pembiayaan macet maka pihak KSPPS harus melakukan penyelesaian atau upaya penyelamatan pembiayaan supaya kesehatan Koperasi dapat terjaga.

Pada praktiknya pembiayaan macet terjadi karena anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban dari pembiayaannya, baik karena alasan benar-benar tidak mampu maupun karena tidak mempunyai itikad baik. Penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pemutihan atau penghapusan data pembiayaan.

Pemutihan atau penghapusan data pembiayaan ini menjadi langkah akhir dalam penyelesaian pembiayaan macet, sebab dalam praktiknya pembiayaan *murābahah* tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Sehingga ketika anggota mengalami kemacetan dalam hal penyelesaian kewajibannya pihak Koperasi tidak mempunyai alternatif penyelesaian lain kecuali pemutihan atau penghapusan data pembiayaan.

Pada sub bab berikutnya penulis akan membahas mengenai praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan dianalisis menggunakan hukum Islam serta menggunakan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS
BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Pada teori, *sād al-dharī'ah* dijelaskan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung *kemaslahatan*, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.² *Sād al-dharī'ah* menurut para ulama terbagi kedalam 2 (dua) segi yaitu segi kualitas kemafsadatannya dan segi jenis kemafsadatannya. Pada segi kualitas kemafsadatannya terdapat empat macam yaitu pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti; kedua, perbuatan yang jarang memberikan kemafsadatan; ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan membawa kepada kemafsadatan; keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 132.

Dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, *sād al-dharī'ah* dibagi menjadi dua macam yaitu perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, dan perbuatan itu pada dasarnya boleh tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.⁴ Menurut Ash-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan tersebut dilarang yaitu:⁵

- Pada praktiknya, Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaan yang menjadi pilihan bagi anggota KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebab proses pembiayaannya sangat mudah dan tidak memberatkan anggota serta dalam hal praktiknya menerapkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. dalam hal praktiknya pembiayaan *murābahah* tidak terlepas dari adanya sebuah resiko dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah pembiayaan macet. Pada saat pembiayaan mengalami kemacetan pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri harus melakukan upaya penyelesaian sehingga terhindar dari adanya kerugian.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 133.

“... Dan jika (orang berutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui...”⁶

Berdasarkan ayat tersebut pihak KSPPS BMT Sumber Barokah harus memberikan kemudahan bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan pembiayaannya dan memberikan alternatif penyelesaian pembiayaan macet tersebut.

Biasanya pihak KSPPS dalam hal penyelesaian pembiayaan macet akan melakukan penjadwalan kembali, dengan penjadwalan kembali pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri memberikan kesempatan kepada anggota yang benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya. Namun ketika anggota sudah benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan macetnya atau tidak mau menyelesaikannya pihak KSPPS akan mengambil langkah penyelesaian akhir dengan melakukan pemutihan atau penghapusan data pembiayaan. Pemutihan atau

[illegible]

Jika dilihat dari jenis kemafsadatannya termasuk kedalam perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, karena penyelesaian pembiayaan macet dengan jalan pemutihan data tersebut akan merugikan pihak lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah KSPPS BMT Sumber Barokah mandiri selain itu juga akan menimbulkan mental tidak sehat bagi anggota. Pada kenyataanya anggota yang mengalami pembiayaan macet dan sudah tidak ada kemungkinan dapat tertagih sangatlah banyak, tentunya dengan alternatif penyelesaian tersebut pihak KSPPS akan sedikit kesulitan dalam hal menjaga kesehatan lembaganya sebab dana cadangan

yang ada tidak dapat menutup kerugian tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan jalan pemutihan data atau penghapusan data pembiayaan menimbulkan kemafsadatan secara *qat'i* dikarenakan akan merugikan pihak lembaga keuangan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesehatan lembaganya serta akan menimbulkan mental tidak sehat kepada anggota.

2. Analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Dewan syariah nasional (DSN) adalah lembaga yang mengeluarkan regulasi tentang operasional lembaga keuangan syariah, bentuk dari regulasi tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan koridor syariat islam.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan macet pada lembaga keuangan syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa ini menjelaskan prosedur penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang macet dengan melakukan beberapa alternatif penyelesaian.

- (a) obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Hal ini berbeda dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 pada butir (a) yang menjelaskan bahwa ketika anggota/nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya maka ia dapat menjual objek

[illegible]

jaminannya atau objek *murābahah*nya kepada LKS guna melunasi kekurangan pembiayaanya. Sehingga sebelum memasuki tahap pemutihan menurut fatwa tersebut pihak nasabah harus menjual objek jaminannya terlebih dahulu dan ketika objek jaminan tersebut sudah tidak ada di tangan nasabah barulah proses pemutihan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, serta pada praktik dilapangan yang terjadi di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Maka proses yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri untuk menyelesaikan pembiayaan *murābahah* yang macet masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dikarenakan dalam hal penyelesaiannya apabila anggota sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya atau mengalami gagal bayar, tidak ada jaminan yang dapat di ambil alih untuk proses penyelesaian pembiayaan tersebut sehingga dalam hal penyelesaiannya pihak KSPPS hanya akan melaksanakan pemutidan data pembiayaan dan akan tetap menagihnya sampai nasabah mampu membayar atau mempunyai itikad baik untuk membayar. Hal ini berbeda dengan tahapan yang ada pada Fatwa DSN dimana dalam hal penyelesaian pembiayaan objek jaminan akan di jual dan digunakan untuk melunasi pembiayaan dan jika objek tersebut sudah tidak ada dan nasabah sudah tidak dapat membayar barulah taham pemutihan atau penghapusan data dapat dilaksanakan.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 77

1. Harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (*character, condition of economy, capacity, capital, collateral*) dalam analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan *murābahah* yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi koperasi dan mampu meminimalisir resiko atau menghindari pembiayaan bermasalah seperti dipersyaratkannya jaminan tambahan dalam setiap pembiayaan.

1. Harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (*character, condition of economy, capacity, capital, collateral*) dalam analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan *murābahah* yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi koperasi dan mampu meminimalisir resiko atau menghindari pembiayaan bermasalah seperti dipersyaratkannya jaminan tambahan dalam setiap pembiayaan.

- Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)". Skripsi--IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017.
- Liana, Zahrotul. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Ma'rufah, Siti. *Wawancara*. Kediri, 11 juni 2019.
- Munziroh. "Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murābahah* Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi, Imam. *Sarh Şahih Muslim*, juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nurul Huda, et al. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- P, Lufti Aris. *Wawancara*. Kediri, 24 Mei 2019.
- Prasetyo, Heru. *Wawancara*. Kediri, 11 Juni 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Soekanto, Soerdjono. *Metodelogi Peneliitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kulitatif fan Kuantitatif fan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumarsono, Soni. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Suratman et al. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Usanti, Tisadini Prasastinah dan A. Shomad. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008.
- Wahyudi, Agung. *Wawancara*. Kediri, 22 Mei 2019.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Waa Adilla Tuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, juz 5. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Fatwa Nomor 47/DSN-MI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII 2017 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- PERSUS KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah.
- PERSUS KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Produk Pembiayaan KSPPS Sumber Barokah Mandiri.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.